

## ABSTRAK

*Sustainable Development Goals (SDGs) 2015* membuka fokus baru pada *universal health coverage (UHC)*. Di Indonesia, konsep UHC sudah dicanangkan sejak tahun 2000 yang kemudian diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Dalam menerapkan JKN, BPJS Kesehatan menggunakan sistem informasi berbasis *cloud* untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yaitu *Primary Care (P-Care)* yang memuat informasi medis lebih dari 222 juta jiwa. Menurut Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) data di dalam P-Care termasuk *protected health information (PHI)* yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu etik dari aspek Deontologi terkait dengan penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta dengan metode *mix method sequential exploratory*. dipilih sudut pandang Deontologi karena prinsip Deontologi adalah nilai instrinsik personal tidak bisa dipisahkan dari isu etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu etik pada penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta, yaitu privasi dan kerahasiaan, keamanan, dan *informed consent* dengan isu pentingnya adalah keterlibatan pihak ketiga dalam *input* data P-Care, P-Care yang bisa diakses di manapun, validasi personal yang kurang, juga diagnosis tercetak yang dapat terbaca oleh siapapun. Dengan faktor yang paling kuat memengaruhi adalah nilai intrinsik masing-masing agen terhadap pemahaman isu-isu etik tersebut.